

**STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN KERJA BIRO PERENCANAAN
UMUM DAN ANGGARAN POLISI DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
POLRI**

SKRIPSI



Oleh :
BELLA ANGGINI
NIM: 22.12.026445

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

**STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN KERJA BIRO PERENCANAAN
UMUM DAN ANGGARAN POLISI DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
POLRI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi
Ilmu Komunikasi



Oleh :
BELLA ANGGINI
NIM: 22.12.026445

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT

skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menguatkan dalam setiap proses. Terima kasih atas cinta yang tulus, pengorbanan, dan kepercayaan yang selalu diberikan. Tanpa doa dan restu kalian, penulis tidak akan sampai di titik ini.
2. Kepada Bripda M.Hadriannur yang penulis kenal sejak 2024, terima kasih sudah hadir di perjalanan ini. Terima kasih untuk dukungan, waktu, dan perhatian yang mungkin sederhana tapi sangat berarti bagi penulis. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan agar penulis tetap kuat, tetap semangat, dan tetap percaya diri sampai di titik ini. Semoga segala kebaikan yang kamu beri, kembali dengan cara yang paling indah.
3. Untuk Wandira sahabat yang selalu ada, terimakasih banyak untuk semua kebbaikanya selama ini, terimakasih untuk setiap keluh kesah yang selalu di tanggap, untuk telinga dan tangan yang selalu merangkul penulis saat suka maupun duka, terimakasih atas segala kebbaikanya, semoga tetap menjadi dira yang penulis kenal.
4. Sahabat seperjuangan, Yunita yang telah menemani sejak semester awal hingga akhir. Terima kasih untuk tawa, air mata, dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis.
5. Dosen pembimbing Ibu Nafa Aqla yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu serta arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak menyerah terima kasih sudah bertahan, berjuang, dan percaya bahwa semua proses ini akan sampai pada akhir yang indah,

RIWAYAT HIDUP

Bella Anggini, Lahir di Sampit, pada tanggal 07 Maret 2004, anak pertama dari Bapak Hariono dan Ibu Susilawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar pada SDN Beringin 7 Murung Raya pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2016 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Murung Raya dan selesai pada tahun 2019. Setelah selesai di SMP, penulis melanjutkan di SMA 3 Murung Raya dan selesai pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada program studi Ilmu Komunikasi.

Demikian riwayat hidup ini disusun sebagai gambaran singkat perjalanan hidup dan pendidikan penulis hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Bagi penulis, perjalanan ini bukan hanya tentang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga tentang proses belajar, menghadapi berbagai tantangan, serta membangun semangat untuk terus berkembang. Penulis menyadari bahwa setiap langkah yang telah dilalui tidak terlepas dari dukungan, doa, dan motivasi dari orang tua, keluarga, sahabat, serta para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan. Oleh karena itu, riwayat hidup ini menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang penulis dalam meraih cita-cita dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh Pendidikan.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberika doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat melewati Perjalanan ini.
5. Uuntuk satker Biro Rena Polda Kalteng terimakasih telah memberikan waktu dan keempatan untuk penulis Melaksanakan Magang selama dua bulan, Sampai pada penulis melakukan penelitian Untuk tugas akhir.

RINGKASAN

Bella Anggini 2022 Program Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Strategi Komunikasi Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polisi Daerah Kalimantan Tengah Dalam Mensosialisasikan Program Reformasi Birokrasi Polisi.

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi, Reformasi Birokrasi Polri, Sosialisasi Program, Biro Perencanaan Umum dan Anggaran

Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran (Biro Rena) di Polda Kalimantan Tengah dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, serta kualitas pelayanan di dalam lembaga pemerintah, termasuk organisasi kepolisian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi yang diterapkan dalam menyampaikan informasi mengenai reformasi birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses komunikasi serta pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan telah mengikuti tahapan strategi komunikasi menurut Cangara (2017), yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap penelitian dilakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik audiens, tahap perencanaan difokuskan pada penyusunan pesan dan pemilihan media komunikasi, tahap pelaksanaan dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital, sedangkan tahap evaluasi dan pelaporan digunakan untuk menilai efektivitas serta perbaikan strategi komunikasi yang telah dijalankan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Biro Rena Polda Kalimantan Tengah telah berjalan secara sistematis dan terstruktur, serta mampu mendukung keberhasilan sosialisasi program reformasi birokrasi. Namun demikian, diperlukan peningkatan pada aspek pemanfaatan media komunikasi digital dan penguatan umpan balik dari masyarakat agar efektivitas komunikasi dapat lebih optimal.

SUMMARY

Bella Anggini 2022 Communication Science Program Muhammadiyah University of Palangkaraya, Public Communication Strategy of the Central Kalimantan Regional Police General Planning and Budget Bureau Work Unit in Socializing the Police Bureaucratic Reform Program

Keywords: Public Communication, Strategy, Bureaucratic Reform, Program Socialization, Biro Rena

This study analyzes the public communication strategy used by the Bureau of Planning and Budget (Biro Rena) of the Regional Police of Central Kalimantan in socializing the bureaucratic reform program. Bureaucratic reform is an effort to improve governance, transparency, and the quality of public services within government institutions, including the police organization.

This research uses a qualitative approach aimed at understanding in depth the communication strategies applied in delivering information about bureaucratic reform. Data were collected through interviews, observations, and documentation with several informants who were directly involved in the communication process and the implementation of the bureaucratic reform program.

The results show that the public communication strategy implemented follows the stages proposed by Cangara (2017), namely research, planning, implementation, evaluation, and reporting. In the research stage, audience needs and characteristics are identified; the planning stage focuses on message design and media selection; the implementation stage is carried out through various socialization activities, both directly and through digital media; while evaluation and reporting are used to assess the effectiveness and improve the communication strategy.

In conclusion, the public communication strategy carried out by Biro Rena of the Central Kalimantan Regional Police has been systematic and well-structured, effectively supporting the dissemination of the bureaucratic reform program. However, improvements are needed in optimizing the use of digital communication media and strengthening public feedback to enhance communication effectiveness.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Komunikasi Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polisi Daerah Kalimantan Tengah dalam Mensosialisasikan Program Reformasi Birokrasi Polri”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang komunikasi dan pengembangan organisasi di lingkungan pemerintahan.

Palangka Raya, Sabtu, 18 April 2026
Penulis

Bella Anggini

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Wawancara dengan Narasumber AKBP Andi Selvi, S.P., M.A.P.....

Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber BRIPTU Asliantho, S.H.....

Gambar 4. Wawancara dengan Narasumber BRIPTU Guntur Suparmanto, S.Sos.

Gambar 5. Wawancara dengan Narasumber BRIPTU Michael Crismapebriandha..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu fungsi strategis dalam sistem pemerintahan modern untuk membangun kepercayaan dan partisipasi Masyarakat (Mendrofa dkk, 2025). Menurut Dewi (2024), komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemerintah kepada dengan tujuan memberikan informasi, edukasi, dan mengubah persepsi atau perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks reformasi institusi pemerintah, komunikasi memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap program dan inisiatif yang diluncurkan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat serta stakeholder yang terlibat.

Salah satu program strategis pemerintah yang memerlukan dukungan komunikasi yang kuat adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan masyarakat. Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan struktural dan administratif, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja aparatur negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mampu menjembatani pemahaman antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.

Program reformasi birokrasi merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan . Sebagaimana diungkapkan oleh Mendrofa dkk (2025), reformasi

birokrasi mencakup perubahan struktural, proses, dan budaya organisasi yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya melibatkan perubahan administratif, tetapi juga memerlukan transformasi mindset dan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kepolisian Negara Re Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum telah mengimplementasikan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan. Menurut Shoimuna (2024), reformasi birokrasi dalam organisasi kepolisian mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Program ini menjadi penting mengingat peran strategis Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga kepercayaan terhadap institusi kepolisian menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera (Wardana, 2025).

Sebagaimana dikemukakan oleh Sanusi (2025), meskipun Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta dituntut memberikan pelayanan profesional, kepercayaan terhadap institusi ini mengalami tantangan akibat berbagai skandal yang mencoreng citra institusi. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pesan-pesan yang konsisten dan transparansi dalam operasionalnya.

Di tingkat daerah, Polda Kalimantan Tengah melalui Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Biro Rena) memiliki tanggung jawab dalam

mengoordinasikan serta mengimplementasikan program reformasi birokrasi. Namun demikian, berbeda dengan fungsi kehumasan yang secara khusus memiliki peran dalam mengelola komunikasi dengan masyarakat, Biro Rena bukan merupakan unit yang secara struktural berfungsi sebagai humas. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena Biro Rena tetap harus menjalankan fungsi komunikasi tanpa dukungan peran kehumasan yang optimal.

Struktur organisasi Polda mencakup berbagai satuan kerja (satker), di antaranya Biro Rena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran) yang memiliki mandat khusus dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja di lingkungan Polda. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat regional terbukti nyata, seperti yang ditunjukkan oleh *Cilegon Police* yang berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2021 (Azzunaika, 2022). Hal ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, institusi kepolisian dapat mencapai standar reformasi birokrasi yang signifikan.

Ketiadaan peran humas secara langsung dalam pelaksanaan sosialisasi program reformasi birokrasi menyebabkan proses komunikasi menjadi kurang terstruktur dan berpotensi tidak maksimal. Padahal, dalam implementasi kebijakan, peran humas sangat penting dalam merancang pesan, memilih media komunikasi, serta membangun hubungan dengan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan komunikasi yang efektif dengan keterbatasan struktur organisasi yang tersedia.

Sosialisasi program reformasi birokrasi merupakan tahap kritis dalam implementasi reformasi yang memerlukan perencanaan komunikasi yang matang dan strategis. Keberhasilan sosialisasi program pemerintah bergantung pada kejelasan pesan, pemilihan media komunikasi yang tepat, dan konsistensi dalam penyampaian informasi kepada berbagai segmen. Tanpa strategi komunikasi yang solid, program reformasi sebaik apapun dapat mengalami hambatan dalam implementasi karena kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta aparatur negara itu sendiri (Simanjuntak, 2025). Penelitian Sanusi (2025) menunjukkan bahwa strategi komunikasi eksternal yang meliputi penyuluhan, operasi keamanan, dan asi melalui media sosial serta konferensi pers dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta membentuk citra profesional dan transparan institusi Polri.

Satker Biro Rena Polda Kalimantan Tengah menghadapi tantangan yang kompleks dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi, terutama karena karakteristik wilayah yang luas serta keberagaman kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi komunikasi yang tidak bersifat umum, melainkan harus disusun secara adaptif dengan mempertimbangkan konteks lokal, perbedaan karakteristik audiens, serta keterbatasan akses terhadap media komunikasi di berbagai wilayah.

Selain itu, terdapat potensi kesenjangan pemahaman antara pimpinan, pegawai operasional, dan masyarakat, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan efektif. Perbedaan kebutuhan dan cara menerima informasi pada masing-masing kelompok menuntut adanya

penyesuaian strategi komunikasi yang lebih spesifik dan terarah agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara optimal (Muin, 2025).

Di sisi lain, meskipun reformasi birokrasi Polri telah menjadi prioritas nasional, kajian mengenai strategi komunikasi yang diterapkan oleh satuan kerja non-humas di tingkat daerah masih terbatas. Satker Biro Rena sebagai unit yang tidak memiliki fungsi kehumasan secara langsung tetap dituntut mampu menyampaikan informasi program reformasi birokrasi kepada berbagai pihak, baik internal organisasi maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan komunikasi yang efektif dengan keterbatasan peran struktural yang dimiliki.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan berbagai pihak terhadap program reformasi birokrasi. Strategi tersebut harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya di Kalimantan Tengah agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, karakteristik geografis dan sosial budaya Kalimantan Tengah yang beragam juga menjadi tantangan dalam proses komunikasi. Wilayah yang luas, keterbatasan akses media di daerah tertentu, serta perbedaan karakteristik audiens menuntut adanya strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual. Tanpa strategi yang tepat, informasi mengenai reformasi birokrasi berpotensi tidak tersampaikan secara merata dan tidak dipahami dengan baik oleh seluruh sasaran.

Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai reformasi birokrasi dalam organisasi kepolisian (Sanusi, 2025; Azzunaika, 2022; Shoimuna, 2024),

fokus kajian yang dilakukan masih memiliki keterbatasan. Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada strategi komunikasi eksternal di tingkat Polres dalam membangun citra lembaga, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek administratif dan pelayanan, serta analisis dampak reformasi terhadap peningkatan profesionalisme institusi. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut lebih berorientasi pada hasil atau output kebijakan, bukan pada proses komunikasi yang melandasinya.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi komunikasi yang diterapkan oleh satuan kerja di tingkat daerah, yaitu Satker Biro Rena Polda Kalimantan Tengah, dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek hasil, tetapi juga menelaah secara mendalam proses komunikasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi komunikasi yang digunakan.

Selain itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji satuan kerja non-humas yang tidak memiliki fungsi komunikasi secara struktural, namun tetap dituntut untuk menyampaikan program reformasi birokrasi kepada berbagai pihak. Hal ini menjadi pembeda utama sekaligus kontribusi penelitian, karena menunjukkan bagaimana strategi komunikasi dijalankan dalam kondisi keterbatasan peran kehumasan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis mendalam mengenai perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi komunikasi yang diterapkan secara spesifik oleh Satker Biro Rena Polda Kalimantan Tengah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas peran humas dalam komunikasi kepolisian atau fokus

pada aspek citra lembaga dan pelayanan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana satuan kerja non-humas, seperti Biro Rena, merancang dan melaksanakan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh Biro Rena sebagai satuan kerja yang tidak memiliki fungsi kehumasan secara langsung, namun tetap dituntut mampu menyampaikan program reformasi birokrasi secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah ilmu komunikasi dan manajemen organisasi pemerintah, serta kontribusi praktis bagi pengembangan strategi komunikasi dalam organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks implementasi program reformasi birokrasi di institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Re Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Komunikasi Satker Biro Rena Polda Kalimantan Tengah dalam Mensosialisasikan Program Reformasi Birokrasi Polri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Kalimantan Tengah dalam mensosialisasikan program reformasi birokrasi Polri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori komunikasi dalam konteks organisasi pemerintah, khususnya dalam pemahaman tentang strategi komunikasi yang efektif dalam sosialisasi program reformasi birokrasi.
- b. Memperkaya pengetahuan tentang dinamika komunikasi dalam lembaga penegak hukum dan cara-cara mengoptimalkan pesan komunikasi untuk mencapai perubahan organisasional yang berkelanjutan.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah dan reformasi institusi di tingkat pusat maupun daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Satker Biro Rena Polda Kalimantan Tengah

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang telah diterapkan, mengidentifikasi area perbaikan, dan merumuskan strategi komunikasi yang lebih optimal dalam sosialisasi program reformasi birokrasi ke depannya.

b. Bagi Polda Kalimantan Tengah dan Jajaran Polri

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis tentang best practices dalam komunikasi untuk sosialisasi program reformasi birokrasi yang dapat diadopsi oleh satuan kerja lain dalam organisasi Polri.

c. Bagi Masyarakat dan Stakeholder

Hasil penelitian dapat meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat tentang program reformasi birokrasi Polri, sehingga

mendorong partisipasi dan dukungan terhadap implementasi program tersebut.

d. Bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Lainnya

Temuan penelitian dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk sosialisasi program-program reformasi birokrasi pemerintah secara umum.